

**UPAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI DALAM MEWUJUDKAN
DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN TAHUN 2017-2018**

Oleh: Gita Hardiirasukma

Email: gitahardi26@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Ministry of Culture and Tourism of Kuantan Singingi has a crucial role, especially in tourism development and cultural preservation. In order to accelerate the development of tourism destinations with the issuance of the Decree of Kuantan Singingi Regency Number: KPTS 11/25/2017, it is necessary to establish a flagship tourism destination which requires integrated, comprehensive and sustainable steps in their realization. However, in fact, the purpose of Kuantan Singingi Regent is difficult to materialize because the Ministry of Culture and Tourism has not been serious in developing the tourism destinations. The formulation of the problem in this study were (1) how is the effort of Ministry of Culture and Tourism of Kuantan Singingi in realizing the flagship tourism destinations in 2017-2018? (2) what are the inhibiting factors in the efforts of the Ministry of Culture and Tourism of Kuantan Singingi in realizing the flagship tourism destinations in 2017-2018?

This study aimed to (1) describe the efforts of the Ministry of Culture and Tourism of Kuantan Singingi in realizing flagship tourism destinations in 2017-2018, (2) describe the inhibiting factors of Ministry of Culture and Tourism of Kuantan Singingi's efforts in realizing flagship tourism destinations in 2017-2018. This research was a descriptive study with a qualitative approach. This study was conducted at the Ministry of Culture and Tourism of Kuantan Singingi. The data was collected through interviews and documentation. The data analysis technique used was an interactive analysis model. The study concluded that the efforts of the Ministry of Culture and Tourism of Kuantan Singingi in realizing flagship tourism destinations in 2017-2018 were seen through the role of entrepreneurs, the role of coordinators, the role of facilitators and the role as stimulators that were not optimal. The efforts of Ministry of Culture and Tourism were influenced by internal factors and external factors. The internal factors were budget constraints, inadequate human resources and regulations; the absence of regional regulations related to the Regional Tourism Development Master Plan of Kuantan Singingi. Meanwhile, the external factors were the lack of community participation in tourism destinations development and the low involvement of the private sector in developing tourism destinations.

Keywords: *Efforts, Development Acceleration, Flagship Tourism Destinations*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem ini membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang pembangunan di daerah.

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pariwisata dikategorikan kedalam urusan pemerintahan konkuren bersifat pilihan. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi: a) Kelautan dan Perikanan, b) Pariwisata, c) Pertanian, d) Kehutanan, e) Energi dan Sumber Daya Mineral f) Perdagangan, g) Perindustrian, h) Transmigrasi.¹

Kabupaten Kuantan Singingi dalam bidang pariwisata mempunyai potensi yang besar untuk digali Untuk mengelola potensi tersebut, peran utama berada pada tangan pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusannya dalam

mengelola pariwisata Kuantan Singingi, hal ini bisa dilihat dari belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembangunan kepariwisataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 8 ayat (1) yaitu “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”.²

Sebagaimana menimbang bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan unggulan daerah serta dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan diperlukan langka terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah maka dikeluarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts 25/11/2017 tentang Penetapan Kawasan Pariwisata dan Nama Objek Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi belum serius dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat bahwa belum adanya peraturan daerah terkait pembangunan dan pengembangan kepariwisataan (RIPDA) sesuai

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

dengan amanat pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Belum munculnya destinasi pariwisata unggulan yang ditargetkan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi melalui Keputusan Bupati Nomor: Kpts 25/11/2017 tentang Penetapan Kawasan Pariwisata dan Nama Objek Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Pokok pikiran dikeluarkannya keputusan bupati tersebut adalah mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan unggulan daerah serta dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan diperlukan langkah terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Minimnya alokasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan khususnya untuk mewujudkan destinasi pariwisata unggulan sulit terwujud. Adapun anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan program pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Alokasi Anggaran Belanja Untuk
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2017- 2018

Tahun	Ideal	Alokasi	Total APBD	%
2017	Rp.5.000.000	Rp.1.300.000	Rp.1.370.000	0,094 %
2018	Rp.5.000.000	Rp.900.000	Rp.1.250.000	0,072 %

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa alokasi anggaran belanja Kabupaten Kuantan Singingi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2017 dan tahun 2018 masih minim. Hal ini dapat dilihat bahwa anggaran ideal untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebanyak Rp.5.000.000.000. Namun yang dialokasikan untuk tahun 2017 hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 dan jika dihitung dari total APBD hanya sebesar 0,094%. Kemudian untuk tahun 2018 hanya sebesar Rp. 900.000.000 dan jika dihitung dari total APBD hanya sebesar 0,072%.

Objek Daya Tarik Wisata di Kuantan Singingi cukup banyak, namun belum seluruhnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts 25/11/2017 Tentang Penetapan Kawasan Pariwisata dan Nama Objek Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 86 Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kuantan Singingi baik objek wisata alam dan budaya. Dari 86 Objek Daya Tarik Wisata tersebut hanya sedikit Objek Daya

Tarik Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan objek daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Objek Wisata	Jenis Wisata
1	Hulu Kuantan	Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban	Alam
2	Kuantan Mudik	Panorama Kebun Nopi	Alam
3	Kuantan Mudik	Air Terjun Guruh Gemurai	Alam
4	Kuantan Tengah	Pacu Jalur	Budaya

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari 86 objek daya tarik wisata yang ada, hanya 4 objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dari 4 objek wisata yang dikelola pemerintah daerah, hanya satu objek wisata yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Objek wisata yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah yaitu Air Terjun Guruh Gemurai melalui retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga. Adapun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2018

Tahun	PAD Pariwisata	PAD Kuantan Singingi
2016	89,000,000.00	70,375,786,187.00
2017	67,611,650.00	54,573,934.025.62
2018	91,692,000.00	60,688,951,772.13

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi sangat sedikit sekali. Hal ini juga membuktikan bahwa belum optimalnya pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu masih dibutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga akan meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan Asli Daerah. Berikut jumlah pengunjung Air Terjun Guruh Gemurai:

Tabel 4
Jumlah Pengunjung Air Terjun
Guruh Gemurai Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)	PAD (Rp)
2016	15.800	78.200.000
2017	10.300	53.200.000
2018	16.794	81.892.000

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung objek wisata Air terjun Guruh Gemurai mengalami naik turun. Pada tahun 2017 mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung air terjun Guruh Gemurai meningkat. Diduga penurunan jumlah pengunjung ini disebabkan oleh belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan objek wisata unggulan Air Terjun Guruh Gemurai.

Berdasarkan fenomena di atas, dalam penelitian mengenai Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Unggulan. Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan dan Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan tahun 2017-2018.

B. Kerangka Teoritis

Peran

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan

perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan berperilaku secara tertentu. “Peran” adalah konsep sentral dari teori peran.

Menurut Briddle & Tomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dalam teorinya Briddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.³

Blakely dalam Mudrajat Kuncoro menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dapat mencakup peran-peran wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator.

1. Wirausaha

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang

³Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), hlm. 215

dapat menciptakan peluang kerja. Dengan peran sebagai wirausaha, pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan pro aktif dalam mengembangkan bisnis daerah.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah dan perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat lainnya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui penyediaan fasilitas pendukung dalam pembangunan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang ada. Dalam bidang kepariwisataan, pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus untuk objek wisata tertentu.⁴

⁴Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan*

Pengembangan Pariwisata

Menurut Salah Wahab, Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.⁵ Menurut Inu Kencana Syafii, unsur-unsur kepariwisataan harus menyeimbangkan antara kebaikan, kebenaran dan keindahan, ada 3 (tiga) unsur-unsur yang menjadi penarik dari objek pariwisata yaitu:

- a. Unsur Geografis
- b. Unsur Historis
- c. Unsur Kultural.⁶

Menurut Bambang Sunaryo, berbagai komponen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan destinasi pariwisata (*tourism product designing*) adalah sebagai berikut:

1. Atraksi dan Daya Tarik Wisata yaitu objek daya tarik wisata ini mencakup daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya maupun buatan. Berbagai atraksi dan daya tarik tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting pada sisi produk wisata, terutama dalam menarik kunjungan wisatawan ke destinasi. Menurut Mariotti (1985), Yoeti (1987), terdapat 3 syarat utama agar dapat menarik

peluang), Yogyakarta: Erlangga. Hlm. 113

⁵Oka A Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Jakarta: ANGKASA, 1982), hlm. 107.

⁶Inu Kencana Syafi'ie, *Ekologi Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hlm. 39

wisatawan mengunjungi destinasi, yaitu:

- a. Destinasi tersebut harus mempunyai apa yang disebut *"something to see"*
 - b. Destinasi tersebut harus mempunyai apa yang disebut *"something to do"*
 - c. Destinasi tersebut harus mempunyai apa yang disebut *"something to buy"*
2. Amenitas atau Akomodasi yaitu, berbagai jenis fasilitas dan kelengkapannya yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai dengan nyaman serta menginap selama melakukan kunjungan ke suatu destinasi.
 3. Aksesibilitas dan Transportasi yaitu, segenap fasilitas dan modal angkutan yang kemungkinan dan memudahkan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi.
 4. Infrastruktur Pendukung yaitu, fasilitas pendukung yaitu keseluruhan jenis fasilitas umum yang berupa prasarana fisik seperti: pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan jaringan telekomunikasi serta fasilitas fisik yang lain seperti jaringan listrik, air minum, toilet, dll.
 5. Fasilitas Pendukung Wisata Lainnya yaitu, berbagai jenis fasilitas pendukung kepariwisataan yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan selama melakukan kunjungan di suatu destinasi, seperti: keamanan, rumah makan, biro perjalanan, toko cinderamata dll.
 6. Kelembagaan dan sumber daya pariwisata yaitu, keseluruhan unsur organisasi atau institusi

pengelola kepariwisataan dan termasuk sumber daya manusia pendukungnya, yang terkait dengan manajemen pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi, baik dari unsur pemerintah, swasta/industri dan masyarakat. Misalnya: Dinas Pariwisata beserta keseluruhan Unit Pelaksana teknisnya, ASITA, PHRI, dll.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Dinas Pariwisata dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Unggulan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Peran sebagai Wirausaha

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Pantai, jalan raya dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja.

a. Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan objek wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejauh ini, objek wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi belum berkontribusi dalam jumlah yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana hanya satu objek wisata yang berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yaitu Air Terjun Guruh Gemurai.

⁷Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm,25-31

Pada tahun 2017, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pengelolaan objek wisata air terjun Guruh Gemurai melalui program pengembangan destinasi pariwisata. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata Air Terjun Guruh Gemurai sebagaimana yang terdapat di dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 90.000.000.

Sedangkan pada tahun 2018, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata Air Terjun Guruh Gemurai. Adapun anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.95.450.000. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan pagu indikatif yang meningkat. Namun untuk pemeliharaan sarana prasarana objek wisata tersebut masih belum optimal sebagaimana pada tahun 2017 persentase capaian kegiatan hanya 80% dan untuk tahun 2018 persentase capaian kegiatan hanya sebesar 85%.

b. Pengelolaan Tempat Penginapan

Pemerintah daerah dalam memajukan kepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi membangun hotel kuansing dan satu wisma jalur. Namun untuk hotel kuansing dengan kelas bintang tiga masih belum dioperasikan sampai saat ini. Sebaliknya wisma jalur sudah beroperasi sejak lama dan menjadi pilihan menginap bagi tamu-

tamu pemerintah daerah, perusahaan serta keluarga saat berkunjung ke kota jalur

Pengelolaan tempat penginapan dilakukan terhadap wisma jalur. wisma jalur merupakan bangunan yang dimanfaatkan bagi pemerintah daerah yang bernilai ekonomi yang juga mendukung kepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menyediakan tempat penginapan ataupun akomodasi yang juga dapat membuka peluang pekerjaan dan berkontribusi kepada pendapatan asli daerah yang mendukung pariwisata Kuantan Singingi.

2. Peran sebagai Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan dan strategi tersebut.

Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

1. Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Bappeda Litbang Kabupaten Kuantan Singingi

melakukan kajian yang nantinya menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pembuatan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa “Pemerintah beserta lembaga terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk melakukan pembangunan kepariwisataan.” Namun, hingga saat ini RIPPDA Kabupaten Kuantan Singingi masih belum ada dan masih pada tahap penyelesaian.

2. Koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya membangun UKM di Kabupaten Kuantan Singingi guna memenuhi syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah destinasi pariwisata adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan usaha kecil menengah yang membantu pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singigni. Koordinasi yang dilakukan hanya terkait permintaan peserta pelatihan dan data-data tentang industri kreatif pada tahun 2018. Untuk koordinasi terkait program kerja antara seksi ekonomi kreatif dengan Disperindag masih belum ada.

3. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Upaya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi terkait komponen aksesibilitas.

Pada tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait pembuatan DED (*Detail Engineering Design*) pembangunan fasilitas dan infrastruktur jalan menuju objek wisata Air Panas Sungai Pinang. Pada tahun 2017 pengembangan Air Panas Sungai Pinang hanya sebatas pembuatan DED saja, belum pada tahap pembangunan.

Sedangkan untuk tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melakukan pembangunan jalan menuju objek wisata pemandian air panas sungai pinang.

3. Peran sebagai Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui penyediaan fasilitas pendukung dalam pembangunan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya.

1. Penyediaan Fasilitas Objek Wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan melaksanakan program pengembangan destinasi pariwisata. Program tersebut merupakan program rutinitas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2017 dalam program pengembangan destinasi pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi hanya melakukan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana objek wisata dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000. Pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata tersebut hanya dilakukan pada objek wisata Air Terjun Guruh Gemurai.

Sedangkan untuk tahun 2018, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata air terjun Guruh Gemurai dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana objek wisata. Penyediaan sarana dan prasarana ini dilakukan di dua objek wisata yang diprioritaskan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban dan Taman Wisata Danau Koto Kari.

Pembangunan fasilitas objek wisata dilakukan di Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban dengan rincian pembangunan dermaga perahu dengan pagu indikatif sebesar Rp. 97.320.000, pembangunan 14 toilet dengan pagu indikatif sebesar Rp.488.775.000, dan pembangunan 14 gazebo dengan pagu indikatif

sebesar Rp.698.250.000. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Kemudian pengadaan kereta dayung untuk Danau Mesjid Koto Kari dengan pagu indikatif sebesar Rp.50.000.000, dengan jumlah barang sebanyak 10 kereta dayung.

2. Promosi Pariwisata

Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mempromosikan pariwisata Kuantan Singingi guna menarik wisatawan dan pihak ketiga untuk bekerja sama mengembangkan pariwisata dan mewujudkan destinasi pariwisata unggulan pada tahun 2017 dan 2018 adalah dengan melakukan kegiatan promosi dalam bentuk pameran ke luar daerah dan bekerja sama dengan lembaga Informasi Pacu Jalur Kuantan Singingi (IPJKS) dalam mempromosikan pariwisata. Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan promosi melalui media seperti *pamflet*, *spanduk*, *handbook* dan juga ada berupa *kaset CD*. sebelum dilakukannya promosi destinasi pariwisata, hal yang paling penting terlebih dahulu dilakukan adalah membenahi destinasi pariwisata. Sehingga apa yang dipromosikan sesuai dengan keadaan destinasi wisata.

3. Sosialisasi Pengelolaan Rumah Tinggal Sementara (*Homestay*)

Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan dilihat dari perannya sebagai fasilitator yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan *homestay* di

Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017. Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan untuk memberikan arahan kepada masyarakat sekitar objek wisata dalam pengelolaan *homestay*.

Adapun materi dalam sosialisasi pengelolaan *homestay* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman pengelolaan *homestay*
- b) Kejelasan pasar *homestay* di destinasi wisata
- c) Pelayanan di *homestay*
- d) Kerja sama untuk memajukan destinasi wisata dan *homestay*

4. Peran sebagai Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Dalam bidang kepariwisataan, pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu guna menarik partisipasi pihak lain dalam pembangunan kepariwisataan.

1. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan menstimulasi masyarakat di sekitar objek wisata dengan melakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan kelompok sadar wisata (*pokdarwis*). Di Kabupaten Kuantan Singingi kelompok sadar wisata

(*pokdarwis*) berjumlah tiga kelompok yang tersebar di Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Sentajo Raya.

Kegiatan pelatihan dan pembinaan kelompok sadar wisata (*pokdarwis*) merupakan kegiatan rutin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan bagian dari program pengembangan kemitraan, pembinaan dan pelatihan kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian tidak hanya Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan Pembinaan dan Pelatihan, tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau juga melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun materi dalam pembinaan dan pelatihan kelompok sadar wisata tersebut yaitu mengenai bagaimana pelayanan kepada pengunjung dan mewujudkan komponen *sapta pesona*. Adapun komponen *sapta pesona* yang dimaksud, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keindahan, keramah tamahan dan kenangan.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Unggulan

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Dana

Faktor yang sangat mempengaruhi sekali dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi adalah

keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Minimnya anggaran dari pemerintah serta kurangnya pihak ketiga dalam menanamkan modal membuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan menjadi tidak optimal.

Alokasi anggaran belanja Kabupaten Kuantan Singingi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2017 dan tahun 2018 masih minim. Hal ini dapat dilihat bahwa anggaran ideal untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebanyak Rp.5.000.000.000. Namun yang dialokasikan untuk tahun 2017 hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 dan jika dihitung dari total APBD hanya sebesar 0,094%. Kemudian untuk tahun 2018 hanya sebesar Rp. 900.000.000 dan jika dihitung dari total APBD hanya sebesar 0,072%.

a. Sumber Daya Manusia yang belum Memadai

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas sumber daya manusia di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah cukup memadai yaitu berjumlah 33 orang. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan di dominasi oleh Strata 1, sedangkan dari sisi golongan didominasi oleh golongan III.

Kemudian dari segi kualitas sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi masih belum memadai.

c. Regulasi

Regulasi merupakan hal yang sangat penting karena regulasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sendiri terkendala dalam pengembangan destinasi pariwisata karena regulasi seperti Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sampai saat ini masih dalam tahap revisi-revisi, jadi sulit untuk mengembangkan pariwisata karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi perlu mensinkronkan antara Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah) sehingga dapat mengembangkan destinasi pariwisata secara optimal.

2. Faktor Eksternal

a. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan. Sebagaimana masyarakat di sekitar objek wisata sebenarnya memiliki peran penting dalam pengembangan objek wisata. Masyarakat merupakan pilar utama dalam pengembangan pariwisata. Rendahnya partisipasi masyarakat di sekitar objek wisata dapat ditunjukkan dengan jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang ada di Kuantan Singingi, yaitu berjumlah tiga kelompok yang

tersebar di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Sentajo Raya.

Kemudian, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan sarana prasarana juga masih kurang dikarenakan tidak adanya kontribusi penghasilan dari objek wisata kepada desa, oleh karena itu masyarakat banyak yang bersikap tidak mau tahu. Selain masyarakat, anggota kelompok sadar wisata sendiri pun pada hari biasanya juga tidak selalu di lokasi, hanya 4 atau 5 orang yang ada di lokasi kecuali jika ada kegiatan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana serta kebersihan di sekitar objek wisata

- b. Rendahnya keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan destinasi pariwisata

Belum adanya kerja sama antara pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dengan pihak swasta dalam mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Pihak swasta hanya berkontribusi pada festival pacu jalur dan itu hanya kepada masing-masing jalur sebagai sponsor dana. Dinas Pariwisata sudah melakukan upaya seperti melalui kegiatan expo untuk menarik pihak swasta untuk mau bekerja sama dalam pengembangan destinasi pariwisata, namun upaya yang dilakukan masih belum berhasil untuk menarik pihak swasta untuk mau bekerja sama.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan tahun 2017-2018 masih belum optimal. Faktor-faktor yang menghambat upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menghambat yaitu, keterbatasan dana, belum adanya peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, dan sumber daya manusia yang belum memadai. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam memelihara dan memanfaatkan fasilitas yang ada dan rendahnya keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan destinasi pariwisata.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pembangunan kepariwisataan di Kuantan Singingi berjalan optimal.
- b. Bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi baik yang tinggal di kawasan wisata atau pun tidak untuk saling bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Dimana masyarakat merupakan salah satu pilar dalam pembangunan kepariwisataan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk lebih memberi kontribusi yang lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Candi Gerbang
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kencana Syafi'ie, Inu. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soekanto, Soejono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI
- Yoeti, Oka A. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: ANGKASA.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Keputusan Menteri Pariwisata Nomor:KM.101/KU.101/MP/2017 Tentang Kegiatan yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Pada Kementrian Pariwisata Tahun Anggaran 2018
- Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor:Kpts 25/11/2017 tentang Penetapan Kawasan Pariwisata dan Nama Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Skripsi:

Ardy Juliandi. 2017. *Pengembangan Wisata Bahari di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2013*. Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Riau.

Benni Olan Hutapea. 2017. *“Manajemen Urusan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kawasan Wisata Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015”* (Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan).

Desi Hardianti. 2018. *Upaya pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017*. (Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan, 2018)

Jurnal:

Hermansyah. 2015. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)*, eJournal

Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 2, 2015: 351-362

Nur Ema Purnama, dkk. *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1, 2018: 487-500.

Dokumen-Dokumen:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2016-2021

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan 2018 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017 dan 2018

Website:

Akses Menuju Tempat Wisata (2018, 6 April) Dikutip pada 23 Maret 2019 dari riaumadani: (<http://riaumadani.com/read-4864-2018-04-06-pemkab-kuansing-akan-perbaiki-jalan-menuju-wisata-air-terjun-pati-soni-dan-wisata--air-panas.html>)

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dari Kuansing.go.id (<https://kuansing.go.id/id/page/peta-wilayah.html>) Diakses pada 28 Februari 2019